

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PARAKANMANGGU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh
SURYATI

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik masih kurang sesuai dengan pendapat Solekhah (2014: 152) merumuskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi. Bergitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa masyarakat kurang melibatkan diri pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan fisik yang dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan tidaksesuaijumlah undangan rapat yang dilakukan dengan jumlah penghadir rapat sehingga ketika diundang sebanyak 65 orang masyarakat maka hanya 45 orang yang hadir. Bergitupula ketika masyarakat diminta swadaya untuk pelaksanaan pembangunan maka masih ada masyarakat yang enggan untuk memberikan sumbangan baik uang maupun tenaga sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sesuai rencana yang dituangkan dalam RKPdesa. 2) Adanya beberapa hambatan yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik kurang optimal, hal ini dikarenakan dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat kurang dilibatkan, begitupula pada tahap pelaksanaan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RKPDes tidak sesuai sehingga masyarakat tidak mau memberikan dukungan dana maupun tenaga dalam pembangunan selain itu pada tahap evaluasi masyarakat tidak dapat memberikan penilaian secara objektif. Bergitupula dengan observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dibuktikan dengan tidak tercapainya swadaya masyarakat untuk pembangunan fisik yang dilaksanakan. 3) Adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai rapat perencanaan pembangunan fisik, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangan baik berupa dana maupun tenaga serta melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan memberikan penilaian secara objektif terhadap pembangunan sertameningkatkan keterlibatan masyarakat dalam meberikan berbagai masukan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan. Bergitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa dilakukan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat pada proses perencanaan dengan cara mengundang masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik serta menyusun anggaran biaya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan Fisik

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan. Tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan

kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi

penyelenggaraan pemerintahan, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya, pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman.

Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu dioptimalkannya partisipasi masyarakat, yakni keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. perencanaan partisipatif diwujudkan melalui musyawarah perencanaan. Dalam musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara, masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi nonpemerintah, dan lain-lain. Menurut Sumardi (2009 :132) bahwa : "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi".

Partisipasi masyarakat adalah hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan

untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Maka agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam pembangunan. Dalam masyarakat desa, perencanaan partisipatif merupakan sebuah instrumen yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif yang merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan tersebut di atas adalah tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di desa.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah juga harus ada sebab masyarakat adalah pemilik kedaulatan, masyarakat adalah membayar pajak dan masyarakat adalah subjek dalam pembangunan. Selain itu, program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan secara partisipasi turut memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat dalam perencanaan yang menyangkut kesejahteraan mereka dan melaksanakan sendiri serta memetik hasil program yang dicapai.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlunya masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya

partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan, terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat kualitas.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat timbul tidaklah semata-mata dengan sendirinya melainkan ada hal-hal yang mampu mempengaruhinya, sehingga masyarakat merasa sadar dan terdorong untuk terlibat lebih jauh dalam segala aspek kehidupan negara. Namun kenyataan yang terjadi partisipasi masyarakat semakin hari semakin menurun hal ini dapat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan sehingga kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam perencanaan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan. Seperti : keikutsertaan masyarakat dalam berbagai pertemuan atau rapat masih sangat rendah walaupun telah diupayakan melalui surat undangan tetapi tetap tidak datang sehingga berdampak pada kesulitan dalam menentukan program prioritas yang dapat dilaksanakan.
2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk iuran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desa masih rendah sehingga menyebabkan target pelaksanaan pembangunan fisik tidak tercapai secara optimal. Seperti : pemasukan swadaya masyarakat untuk perbaikan jalan ditargetkan sebesar Rp. 98.650.000 tetapi hanya masuk sebesar Rp. 52.325.000.
3. Sering terjadi proyek kegiatan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Contohnya : dalam rencana kerja

pembangunan desa telah ditetapkan rencana pembangunan mandi, cuci, kakus namun pada pelaksanaannya dilakukan pembangunan saluran irigasi sehingga hal ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan desa.

4. Masyarakat belum mengerti betul pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga keikutsertaan masyarakat masih kurang dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Contohnya: semakin rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong pemeliharaan jalan, jembatan maupun irigasi yang sedang dilaksanakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik mengingat laju pembangunan terutama pembangunan fisik sangat cepat dan memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi. Untuk itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?.

LANDASAN TEORI

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Salah satu ciri dari suatu daerah yang sudah maju dan mandiri adalah terciptanya peranserta masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat makin terbuka dan makin tinggi kesadarannya, serta semakin tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Sudriamunawar (2006:54) menyatakan :

Bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional menuntut adanya partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat akan menunjang dalam pengelolaan potensi daerah, sehingga proses pembangunan akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Secara sederhana, partisipasi masyarakat adalah peran serta atau keikutsertaan masyarakat. Untuk mendorong rakyat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan masalah yang perlu dicari pemecahannya.

Jenis-jenis Partisipasi

Menurut Setiawan (2011:42) partisipasi terdiri dari 4 jenis yaitu antara lain :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil
4. Partisipasi dalam penilaian

Partisipasi sebagai pemberdayaan, merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa meskipun sulit untuk didefinisikan, akan tetapi pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Menurut Ndraha (1990:125-126) partisipasi masyarakat memiliki beberapa tahap dalam prosesnya antara lain :

1. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain,
2. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya,
3. Partisipasi dalam arti perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan/ kebijakan seperti proses penentuan arah dan strategi,
4. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, program dan proyek pembangunan,
5. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan,
6. Partisipasi dalam keterlibatan mereka mengevaluasi program pembangunan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat

mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Dibentuknya lembaga di setiap desa sebagai wujud partisipasi masyarakat desa akan mempercepat proses pembangunan fisik di desa. Hal ini dikarenakan masyarakat desa akan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka karena tumbuh dan berkembang dari masyarakat desa itu sendiri (*grassroot*).

Tujuan Pembangunan

Adisasmita (2005:117) menyatakan bahwa:

Pembangunan merupakan suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Suatu kinerja pembangunan yang sangat baik pun, mungkin saja menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak diharapkan.

Kompleksitas permasalahannya bertambah besar karena ruang lingkup permasalahannya telah bertambah luas. Pendekatan terhadap permasalahan pembangunan dan cara pemecahannya telah mengalami perkembangan pula.

Pembangunan dan pengembangan harus berjalan sesuai dengan kebijakan publik yang telah disusun sebelumnya. Kebijakan publik yang disusun harus mencakup kepentingan dari seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Miraza, (2005:67), niat dan keinginan itu harus diawali dengan penciptaan kebijakan publik sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat.

Menurut Setyaningrum (1997:86) : "Infrastruktur adalah bagian dari kapital stock dari suatu negara, yaitu biaya tetap sosial yang langsung mendukung produksi". Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik
di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
SURYATI

produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik

Partisipasi masyarakat dapat meliputi keterlibatan secara mental spiritual dan ketersediaan memberikan suatu sumbangan baik materi, dana, pikiran maupun tenaga, di mana unsur-unsur tadi diarahkan bagi usaha mencapai tujuan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam segala jenis pembangunan yang diselenggarakan di desa dengan cara memberikan sumbangan dalam bentuk gagasan, materi dan tenaga. Solekhah (2014: 152) merumuskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*)
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Untuk mengetahui mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat disajikan dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara Mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Subvariabel	Indikator	Tanggapan informan	
1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (<i>participation in decision making</i>)	a. Memberikan ide-ide tentang program pembangunan fisik	Informan no. 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,21,22 dan 23 atau 69,56 % menyatakan masyarakat sudah dapat memberikan ide-ide tentang program pembangunan fisik	Informan 2, 5, 6, 7, 8, 10 dan 20 atau 30,45% menyatakan masyarakat kurang memberikan ide-ide tentang program pembangunan fisik

	b. Aktif dalam rapat-rapat perumusan program pembangunan fisik	Informan no. 1, 8, 9, 11, 12, 17 dan 21 atau 30,43% menyatakan masyarakat telah aktif dalam rapat-rapat perumusan program pembangunan fisik	Informan no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,22 dan 23 atau 69,56 % menyatakan masyarakat kurang aktif dalam rapat-rapat perumusan program pembangunan fisik
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (<i>participation in implementation</i>)	a. Memberikan bantuan dana untuk kegiatan pembangunan fisik	Informan no. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17 atau 82,61% menyatakan masyarakat sudah dapat memberikan bantuan dana untuk kegiatan pembangunan fisik	Informan no. 4,15,18 dan 22 atau 17,39% menyatakan masyarakat kurang memberikan bantuan dana untuk kegiatan pembangunan fisik
	b. Memberikan bantuan tenaga untuk kegiatan pembangunan fisik	Informan no. 1, 5, 6, 7, 8,9,14,15,18,19,20,22 dan 23 atau 65,22% menyatakan masyarakat sudah dapat memberikan bantuan tenaga untuk kegiatan pembangunan fisik	Informan no. 2, 3, 4, 10, 13, 16,17 dan 21 atau 34,78% menyatakan masyarakat kurang dapat memberikan bantuan tenaga untuk kegiatan pembangunan fisik
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (<i>participation in benefit</i>)	a. Mempergunakan hasil pembangunan fisik sesuai dengan fungsinya	Informan no. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,15 dan 16 atau 65,22% menyatakan masyarakat sudah dapat mempergunakan hasil pembangunan fisik sesuai dengan fungsinya	Informan no. 10, 12, 13, 17, 20, 21,22 dan 23 atau 34,78% menyatakan kurang dapat mempergunakan hasil pembangunan fisik sesuai dengan fungsinya
	a. Memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun		
b. Partisipasi dalam evaluasi (<i>participation in evaluation</i>)	a. Memberikan penilaian yang objektif terhadap hasil pembangunan fisik	Informan no. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17,18,19 dan 23 atau 52,17% menyatakan masyarakat sudah dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap hasil pembangunan fisik	Informan no. 3, 9, 12, 13, 14, 15,20,21 dan 21 atau 47,83% menyatakan masyarakat kurang memberikan penilaian yang objektif terhadap hasil pembangunan fisik
	b. Memberikan saran/ solusi untuk meningkatkan pembangunan fisik	Informan no. 1, 5, 6, 7, 8,9,14,15,18,19,20,22 dan 23 atau 65,22% menyatakan masyarakat sudah dapat memberikan saran/ solusi untuk meningkatkan pembangunan fisik	Informan no. 2, 3, 4, 10, 13, 16,17 dan 21 atau 34,78% menyatakan masyarakat kurang dapat memberikan saran/ solusi untuk meningkatkan pembangunan fisik
Prosentase rata-rata		52,17%	47,83%

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebanyak 52,17% dan yang menyatakan masih kurang sebanyak 47,83%.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik belum sepenuhnya sesuai dengan Solekhah (2014: 152) merumuskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*)
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik diketahui bahwa partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka masih rendah, selain itu partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang, dana dan sarana masih kurang sedangkan dalam proses pengambilan keputusan masih kurang keterlibatan masyarakat yang dibuktikan dengan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan. Begitupula dalam hal keikutsertaan masyarakat dalam bentuk dukungan kegiatan pembangunan fisik masih kurang optimal sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan masih kurang optimal.

Oleh karena itu maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan pendapat Yulianti, (2000: 87), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi mempunyai sifat yang penting yaitu :

Pertama, partisipasi masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai lokasi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-

proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, lalu Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep "*man centred development*" yaitu suatu pembangunan yang di pusatkan pada kepentingan manusia, yaitu jenis pembangunan yang lebih Diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar alat pembangunan itu sendiri. Karena dalam proses pembangunan akan jauh lebih baik, bila sejak awal sudah mengikut sertakan masyarakat pemakai hasil pembangunan Dengan demikian hasilnya akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sehingga pelaksanaan pembangunan fisik kurang tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik antara lain :

- a. Tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, seperti keikutsertaan masyarakat dalam berbagai pertemuan atau rapat masih sangat rendah walaupun telah diupayakan melalui surat undangan tetapi tetap tidak datang sehingga berdampak pada kesulitan dalam menentukan program prioritas yang dapat dilaksanakan.
- b. Pemberian sumbangan materi berupa uang masih rendah sehingga kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam

bentuk iuran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desa masih rendah sehingga menyebabkan target pelaksanaan pembangunan fisik tidak tercapai secara optimal

- c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu cukup baik, namun terdapat proyek yang tidak bisa diselesaikan karena kemampuan masyarakatnya masih rendah.

Hambatan-hambatan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Bappenas, 2001: 78) yang hambatan atau kendala dalam partisipasi tergantung kepada situasi setempat, ada kendala penting dalam partisipasi yaitu :

1. Waktu, masyarakat akan meluangkan waktunya untuk proyek apabila mereka merasa bahwa proyek berguna.
2. Menyusun dan membuat pandangan mereka sendiri, partisipasi akan menjadi kendala apabila dalam forum-forum masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk menyalurkan pandangan mereka.
3. Sikap profesional, sikap dari para pelaksana (pendamping dan aparat pemerintah) harus berpihak kepada masyarakat. Mereka harus percaya kepada kemampuan masyarakat dan dapat membagi pengetahuannya.

Belajar dari pengalaman, semua kelompok masyarakat berbeda. Para pelaksana harus fleksibel dan mau belajar dari pengalaman serta mencoba beberapa metode dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kapasitas dari masyarakat dan institusi dapat berubah dengan sendirinya, mendapat pengakuan, dukungan dan menambah kepercayaan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik mengalami berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara optimal sehingga hal tersebut menuntut kepala desa melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat seperti melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan fisik dengan cara menyebarkan undangan kepada masyarakat dan lebih

mengintensifkan komunikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat terlibat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan.

- a. Upaya dalam kegiatan perencanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai rapat perencanaan pembangunan fisik, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara mengundang masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik serta menyusun anggaran biaya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan.
- b. Upaya agar masyarakat dapat memberikan sumbangan baik berupa dana adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendirian usaha bersama dan koperasi.
- c. Upaya mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidup sendiri.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rolalisasi (2008) mengatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan modal sosial yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat akan meningkat seiring meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial.

Upaya mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidup sendiri. Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 tahap kegiatan, yaitu kegiatan dalam pengambilan inisiatif, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pengelolaan dan pemeliharaan.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebanyak 52,17% dan yang menyatakan masih kurang sebanyak 47,83%. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa masyarakat sudah dapat melaksanakan partisipasi sesuai dengan pendapat Solekhah (2014: 152) tentang bahwa bentuk-bentuk partisipasi.
2. Adanya beberapa hambatan yang dihadapi antara lain a) Tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, seperti keikutsertaan masyarakat dalam berbagai pertemuan atau rapat masih sangat rendah walaupun telah diupayakan melalui surat undangan tetapi tetap tidak datang sehingga berdampak pada kesulitan dalam menentukan program prioritas yang dapat dilaksanakan. b) Pemberian sumbangan materi berupa uang masih rendah sehingga kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam bentuk iuran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desa masih rendah sehingga menyebabkan target pelaksanaan pembangunan fisik tidak tercapai secara optimal, c) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu cukup baik, namun terdapat proyek yang tidak bisa diselesaikan karena kemampuan masyarakatnya masih rendah.
3. Adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan partisipasi masyarakat diantaranya a) upaya dalam kegiatan perencanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai rapat perencanaan pembangunan fisik, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan cara mengundang masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik serta menyusun anggaran biaya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan. b) Upaya agar masyarakat dapat memberikan sumbangan baik berupa dana adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendirian usaha bersama dan koperasi. c) Upaya mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidup sendiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sebaiknya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik lebih terfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti dalam perencanaan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan, partisipasi masyarakat dalam bentuk iuran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desa dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong pemeliharaan jalan, jembatan maupun irigasi yang sedang dilaksanakan.
2. Untuk mengatasi hambatan sebaiknya Pemerintah Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pembangunan fisik, melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan dan mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran lebih berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik lebih memperhatikan dalam kegiatan perencanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai rapat perencanaan pembangunan fisik dan upaya agar pendapatan masyarakat dapat meningkat seperti adanya pemberian bantuan modal untuk usaha perorangan ataupun usaha bersama dan koperasi

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, UGM. Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siagian P. Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.